

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN BUDAYA 2025**



## KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan DPA Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024. Perbandingan realisasi program kegiatan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menghasilkan data capaian kinerja dalam besaran keluaran (output) dan hasil (outcome) yang menjadi umpan balik perencanaan program kerja tahun mendatang. Data capaian kinerja menjadi landasan pijak evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat berwenang, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebagai bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintah, diharapkan mampu mengembangkan kinerja dinas, baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan adanya perbaikan dimasa mendatang.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1.
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL .....	2
1. Sumber Daya Aparatur.....	4
2. Sarana dan Prasarana.....	6
3. Keuangan .....	9
D. ISU-ISU STRATEGIS .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b> 11	
A. RENCANA STRATEGIK .....	11
1. Visi dan Misi .....	11
2. Tujuan .....	13
2. Sasaran .....	14
3. Strategi .....	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	15
C. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	15
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITASI KINERJA .....</b> 24	
A. PENGUKURAN KINERJA .....	24
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	24
B. REALISASI KEUANGAN .....	30
C. TARGET DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI IKK) TAHUN 2024.....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b> 40	
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem dan tata kelola administrasi instansi pemerintah diarahkan pada terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap satuan kerja dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam visi dan misi organisasi satuan kerja. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah.

Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Salah satu cara untuk mengetahui apakah azas-azas tersebut telah dilaksanakan serta sejauh mana tingkat capaian kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program kegiatannya adalah dengan memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh, terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Sistem dimaksud dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang sosial.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu diukur dan dievaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana/anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Disamping itu, beberapa maksud dan tujuan yang dapat dilihat dalam penyusunan laporan ini, antara lain adalah :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2024.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial terhadap kemampuan dana/anggaran yang di kelola.
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Adapun Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Tahun 2024 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga unsur Penyelenggara Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan.

## **C. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL**

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 510).

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan dibidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan/ struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial ; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;

10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1. Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2024 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 105 (Seratus Lima) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, Kontrak Pusat sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Orang, dan PTT sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang, dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	I/a	- orang
2	I/b	- orang
2	I/b	- orang
3	I/c	- orang
4	I/d	- orang
5	II/a	- orang
6	II/b	- orang

7	II/c	- orang
8	II/d	1 orang
9	III/a	5 orang
10	III/b	3 orang
11	III/c	2 orang
12	III/d	6 orang
13	IV/a	2 orang
14	IV/b	2 orang
15	IV/c	- orang
Jumlah		21 Orang

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 2 (Dua) orang.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister S2	5 orang
2	Sarjana S1	11 orang
3	Diploma III	1 orang
4	SMA/Sederajat	4 orang
5	SMP/Sederajat	- Orang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja dengan diimbangi oleh aparatur yang

berpendidikan lebih tinggi serta mengasah skill melalui berbagai pelatihan.

**Tabel 1.3**

**Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar**

NO	KECAMATAN	TKSK		PKH		TAGANA	
		L	P	L	P	L	P
1	BENTENG	1	-	3	1	1	1
2	BONTOHARU	-	1	-	2	1	1
3	BONTOSIKUYU	-	1	1	2	1	1
4	BONTOMATENE	1	-	1	1	1	1
5	BONTOMANAI	1	-	-	2	1	1
6	BUKI	1	-	-	1	1	1
7	PASIMASUNGGU	1	-	2	1	1	1
8	PASIMASUNGGU TIMUR	1	-	3	1	1	1
9	PASILAMBENA	1	-	1	2	1	1
10	PASIMARANNU	1	-	2	-	1	1
11	TAKABONERATE	-	1	4	-	1	1
JUMLAH		8	3	17	13	11	11

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11 Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana sebanyak 22 orang. Implementasi ketersediaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

## 2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial juga memiliki daftar inventaris yang dapat menunjang kinerja pada Dinas Sosial. Adapun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Daftar Inventaris Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi			Tahun Perolehan
			Baik	Sedang	Rusak	
<b>01.</b>	<b>Kendaraan</b>					
	Mobil	2	2			2007,
	Motor	34	32		2	2007-2009,2011, 2013,2015,2021, 2024
<b>02.</b>	<b>Bangunan</b>					
	LK3	1	1			1976
	Kantor	1	1			1978
<b>03.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>					
	Mesin Ketik Listrik	3			3	2009,2011,2013
	Lemari Besi	10	7		3	2014,2015,2016
	Rak Kayu	1			1	1997
	Filling Besi Metal	2			2	1976
	Brangkas	1	1			2011
	Lemari Kaca	4		4		1998,1999
	Lemari Kayu	4			4	2003,2007,2009
	Papan Pengumuman	1			1	1994
	White Board	1	1			2003
	Meja Kayu	14	6		3	1985,1994,1995,1 997,2005, 2007,2008,2021
	Kursi Besi Futura	84	84			2003, 2021
	Kursi Rapat	34	34			2011, 2021
	Kursi Tamu	4	4			1998,2003,2011
	Kursi Putar	3	3			2003,2005,2021
	Kursi Lipat	42	42			2013
	Meja Komputer	48	48			2014

	Meja Biro	1	1			2002
	Kursi Kerja	17	17			2014,
	Rak TV	1	1			2009
	AC	14	14			2009,2011,2012, 2013,2014,2016,2 019,2020
	Dispenser	4	4			2008,2009,2019
	Mesin Jahit	16	16			2008
	Komputer PC	33	5		28	2001,2003,2005,2 007,2009,2010,20 13,2014,
	Laptop	36	33		3	2008,2009,2010,2 011,2013,2014,20 16,2020,2021
	Notebook	9	9			2011,2012,2013, 2014,2016
	Printer	23	14		9	2006,2007,2009,2 010,2011,2012,20 13,2014,2016,202 0,2021
	Meja Kerja	14	14			2008,2009,2010,2 011,2015
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8			2010,2011,2021
	Sound System	3	1		2	2011,2014,2021
	Camera	6	6			2009,2011,2012,2 014
	Facsimile	2	1		1	2009,2016
	Proyektor	1	1			2010
	Layar Proyektor	1	1			2010
	Kulkas	2	2			2020
	Kulkas mini	1	1			2020
	Komputer Destop	7	7			2020, 2021
	I Ped	1	1			2020
	I ped (pkh)	30	30			2020
	Printer portable	1	1			2020

	Ups	2	2			2020,2021
--	-----	---	---	--	--	-----------

Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Sosial ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi dinas sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 3. Keuangan

Sebagai salah satu unsur pendukung yang memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, maka keberadaan sumber pendanaan mutlak diperlukan. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024 Mendapat alokasi dana melalui APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan : Rp. 0,00
- b. Belanja Operasi : Rp. 6.967.316.000,00
- c. Belanja Modal : Rp. 56.534.000,00
- d. Total Belanja : Rp. 7.023.850.000,00
- e. Pembiayaan : Rp. 0,00

Selain dukungan APBD, pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar juga didukung oleh anggaran pusat (APBN) melalui Kementerian Sosial dengan beberapa Program antara lain :

1. Program Sembako / BPNT, sebanyak 9.995 KPM dengan bantuan Rp. 200.000/bulan/KPM, sehingga total bantuan sebanyak Rp. 23.988.800.000,- yang disalurkan dalam 4 tahap.
2. Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 6.601 KPM dengan total bantuan sekitar Rp. 18.547.200.000,- juga disalurkan dalam 4 tahap
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 55.946 jiwa dengan bantuan sebesar 42.000/jiwa/bulan dengan total bantuan sebanyak Rp. 31.553.554.000 selama 1 tahun dan dibayarkan setiap bulan berjalan.
4. Bakti Sosial Kementerian Sosial pada bulan September Tahun 2024 dengan total bantuan sebesar 5,8 M

#### **D. ISU-ISU STRATEGIS**

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut diuraikan beberapa isu strategis terkait permasalahan internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian sasaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kurangnya tingkat kemandirian para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Terbatasnya aparatur atau tenaga pendamping bidang sosial;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS;
- d. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung seperti panti asuhan atau Rumah Singgah;
- e. Belum adanya kerjasama antar OPD terkait pemberdayaan masyarakat miskin;
- f. Belum optimalnya potensi dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun, yakni tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada/mungkin timbul.

Rencana Strategik memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dan program- program.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Visi dan Misi**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumber daya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim  
Kawasan Timur Indonesia”**

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk

melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.

- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan hubungan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
  - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
  - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
  - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
  - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
  - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
  - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
  - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
  - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
  - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
  - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;

- g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
  - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
  - b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
  - c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
  - d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
  - e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026 yang terkait dengan urusan sosial antara lain:

- Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan masyarakat dengan indikator tujuan persentase penurunan jumlah pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dengan indicator meningkatnya nilai SAKIP Dinas Sosial, meningkatnya

kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatnya tertib administrasi keuangan dan asset daerah.

### **3. Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pemerlukan layanan kesejahteraan sosial (PPKS) antara lain:

- Meningkatnya taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, TAGANA, LKS dan Dunia Usaha dalam penanganan PPKS.

### **4. Strategi**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Sosial.

Upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial menetapkan strategi yang diarahkan pada :

1. Meningkatnya Akses keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif.
2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
5. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
6. Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawa ini :

**Tabel 2.1**  
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial	80 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (SPM)	80 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	95 %
2	Meningkanya Penanganan Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana (SPM)	100 %

## C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik Tahun 2021-2026 disusun suatu rencana kerja setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahun 2024 merupakan komitmen seluruh staf untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi organisasi sehingga seluruh proses administrasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan baik.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**

**Perangkat Daerah, dengan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### **b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan**

**3 (Tiga) sub kegiatan antara lain:**

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

### **c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, dengan 1 (Satu)**

**sub kegiatan yaitu :**

- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

### **d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,**

**dengan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :**

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian

### **e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 4**

**(empat) sub kegiatan yaitu :**

- Penyediaan bahan logistik kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

### **f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**

**Daerah, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu :**

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

**g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu :**

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan aset tetap lainnya.

**h) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. Program Pemberdayaan Sosial**

**a) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :**

- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kab/Kota.

**3. Program Rehabilitasi Sosial**

**a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial, dengan 2 (dua) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:**

- Pemberian layanan kedaruratan.
- Pemberian layanan rujukan.

**b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti, dengan 2 (dua) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:**

- Penyediaan Permakanan.
- Pemberian layanan rujukan

**4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**a) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan 1 (Satu) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:**

- Penjangkauan anak-anak terlantar.

**b) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu:**

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota.
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

#### **5. Program Penanganan Bencana**

*a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:*

- Penyediaan makanan.
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi.
- Penanganan khusus kelompok rentan

*b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:*

- Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

#### **6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

*a) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:*

- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir



## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS SOSIAL

Jln. Sosial No. 1 Parappe, Kel. Bontobangun Kec. Bontoheru, 92611, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 2316907, Fax/Fax (0414) 2316907

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P**  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar  
*Selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **H. MUH. BASLI ALI**  
Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar  
selaku atasan langsung pihak pertama  
*Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Bupati Kepulauan Selayar,

**H. MUH. BASLI ALI**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Sosial,

**Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b  
NIP : 19730217 199803 2 001  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa saya akan merealisasikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Program Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai target kinerja sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut diatas dan berdasarkan hasil perjanjian kinerja, saya tidak dapat mempertanggungjawabkan target kinerja unit kerja saya, maka **saya bersedia diberhentikan dari jabatan saya**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Benteng, 2 Januari 2024



**Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P**  
Nip. 19730217 199803 2 001

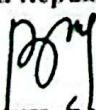
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial	80 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	80 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	95 %
2	Meningkanya Penanganan Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.279.931.000,-
2.	Pemberdayaan Sosial	37.000.000,-
3.	Rehabilitasi Sosial	2.081.600.000,-
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	536.000.000,-
5.	Penanganan Bencana	140.000.000,-
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.000.000,-

Benteng, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Bupati Kepulauan Selayar,

  
H. MUH. BASLI ALI

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Sosial,

  
HJ. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P

**TABEL TARGET KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023		KET
		TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		3,241,664,000	
A	<b>Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		30,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
7	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 Dokumen	10,000,000	
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		2,061,531,000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2,050,731,000	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	7,800,000	
3	Pengelolaan dan Persiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	3,000,000	
C	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		5,000,000	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
D	<b>Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah</b>		3,000,000	
1	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000	
E	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>		431,733,000	
1	Penyediaan bahan logistik kantor	2 Paket	5,000,000	
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	5,000,000	
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 Dokumen	10,000,000	
4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	411,733,000	
F	<b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		38,267,000	
1	Pengadaan perlakatan dan mesin lainnya	1 Unit	38,267,000	
G	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		450,400,000	
1	Penyediaan jasa surat meyurat	1 Laporan	5,000,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	1 Laporan	115,000,000	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	330,400,000	
H	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		260,000,000	
I	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	150,000,000	

2	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,paja,dan perizinan kendaraan dinas operasionalatau lapangan	18 Unit	100,000,000	
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	5,000,000	
4	Pemeliharaan aset tetap lainnya	8 Unit	5,000,000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>37,000,000</b>	
<b>A</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>37,000,000</b>	
1	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	11 Orang	<b>37,000,000</b>	
<b>III</b>	<b>PROORAM REHABILITAS SOSIAL</b>		<b>2,081,600,000</b>	
<b>A</b>	<b>Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.</b>		<b>30,000,000</b>	
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	20 Orang	10,000,000	
2	Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	20,000,000	
<b>B</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Buatan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		<b>2,051,600,000</b>	
1	Penyediaan Permakaman	306 Orang	1,101,600,000	
2	Pemberian Layanan Rujukan	80 Orang	950,000,000	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>78,380,000</b>	
<b>A</b>	<b>Pemeliharaan Anak Terlantar</b>		<b>10,000,000</b>	
1	Rujukan Anak-Anak Terlantar	5 Orang	<b>10,000,000</b>	
<b>B</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>68,380,000</b>	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.929 Keluarga	<b>68,380,000</b>	
2	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	7.127 KPM	100,000,000	
3	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	84 KK	325,000,000	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>140,000,000</b>	
<b>A</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>		<b>40,000,000</b>	
1	Penyediaan Makanan	10 Orang	25,000,000	
2	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Orang	15,000,000	
<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</b>		<b>100,000,000</b>	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	22 Orang	100,000,000	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMA MAKAN PAHLAWAN</b>		<b>30,000,000</b>	
<b>A</b>	<b>Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota</b>		<b>30,000,000</b>	
1	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	28 Makam	<b>30,000,000</b>	

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir.

#### **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, diurut berdasarkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Berikut diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

##### **1. Sasaran “Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)”**

Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya yaitu:

###### **1.1. Persentase PPKS yang memperoleh pemberdayaan sosial**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas antara lain :

1. Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa sub kegiatan antara lain:
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan peningkatan kesejahteraan terhadap 11 (Sebelas) orang pendamping TKSK di setiap kecamatan.
2. Program perlindungan dan jaminan sosial, Kegiatan Penglolaan data Fakir Miskin cakupan daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan antara lain:
  - Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Penerima bantuan PKH yang menerima bantuan pemberdayaan berupa program PENA (Pahlawan

Ekonomi Nusantara) dengan jumlah penerima sebanyak .... KK sampai dengan tahun 2024.

- Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan target 94 KK dengan jenis bantuan yang diberikan berupa Mesin jahit, Bak fiber, Ternak kambing, alat embuat kue, Mesin pemotong Rumput, mesin katintingperalatan Perbengkelan, Kawat duri, paket jualan Sembako, Mesin Senso, Bibit Sapi, alat Pertukangan dll.

*Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 80 % berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah PPKS yang menerima bantuan pemberdayaan sebanyak 305 KK dan yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan sebanyak 925 KK sesuai dengan jumlah PPKS usia produktif, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 32,9 % Dengan demikian capaian yang diperoleh sebesar 41,12 %*

Tidak tercapainya capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran di alokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2024.

## **1.2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas juga merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian penerapan standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yaitu antara lain :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

- Pemberian layanan kedaruratan, yang diperuntukkan khusus untuk anak yang berhadapan hukum (ABH) dengan penanganan berupa pendampingan dan mediasi, dengan jumlah anak yang berhasil didampingi

dan dimediasi selama tahun 2024 adalah sebanyak 40 anak.

- Pemberian Layanan Rujukan, sub kegiatan ini memfasilitasi para ODGJ (Orang dengan gangguan Jiwa) untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan secara insentif dari pihak-pihak terkait. Jumlah ODGJ yang berhasil difasilitasi selama tahun 2024 adalah sebanyak 30 orang.
- 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan beberapa sub kegiatan antara lain:
  - Penyediaan Permakanan, dengan target sebanyak 306 KK dengan bantuan yang santunan sebesar Rp. 3.600.000 dan terealisasi sebanyak 299 KPM
  - Pemberian Layanan Rujukan, kegiatan ini berupa pemberian bantuan rumah tidak layak huni dengan bantuan sebanyak Rp. 10.000.000,-/KPM dalam bentuk barang, target sebanyak 80 KK dan terealisasi 100 %
- 3. Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar, dengan 2 (Dua) sub Kegiatan antara lain :
  - Rujukan anak-anak terlantar, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak terlantar untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk tahun 2024 anak-anak yang berhasil di jangkau sebanyak 5 anak.
- 4. Kegiatan Pelayanan pada Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), SLRT juga merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial berupa Pemberian Layanan dan Rujukan Terpadu, dalam hal ini pemberian layanan berupa rekomendasi PIP (Program Indonesia Pintar) dan jumlah yang telah dilayani sesuai dengan hasil registrasi Sekretariat SLRT sebanyak 252 rekomendasi.

5. Bantuan dari Balai Sentra Pangurangi Kementerian Sosial untuk Penyandang disabilitas dan Lanjut Usia dengan bentuk bantuan Berupa Sembako, Alat pertukangan, Perlengkapan diri, Nutrisi, Kursi roda. Jumlah penerima bantuan penyandang disabilitas dan Lanjut usia sebanyak 901 KPM.
6. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per Desember 2024 sebanyak 9.995 KPM dan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 7.545 KPM
7. Palayanan Data (Cek data DTKS) sebanyak 336 KPM pada tahun 2024.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani dan tertangani selama tahun 2024 sebanyak 19.453 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 24.837 KPM, jadi realisasi capaian sebanyak 78,3 %.

*Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 80 % sedangkan realisasi sebanyak 78,3 %. Persentase capaian adalah 89,98%.*

Tidak tercapainya capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran di alokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2024.

### **1.3. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**

Kegiatan yang mendukung untuk indikator diatas antara lain :

1. Program Nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang biasa dikenal dengan PBI-JKN, untuk tahun 2024 jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 55.946 jiwa.
2. Program Keluarga Harapan (PKH), juga merupakan program nasional yang berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki 3 komponen PKH diantaranya

- komponen pendidikan yaitu yang memiliki anak usia sekolah SD sampai SMA
- Komponen Kesatan yaitu masyarakat miskin yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun serta wanita hamil dan menyusui.
- Komponen kesejahteraan yaitu masyarakat miskin yang memiliki lanjut usia diatas 70 tahun atau penyandang disabilitas.

Jumlah penerima PKH untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahap III tahun 2024 sebanyak 7.545 KPM

3. Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nominal bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 / KPM yang disalurkan oleh Bank Himbara kemudian oleh PT Pos untuk tahap III. Jumlah penerima Program Sembako untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 9.995 KPM.
4. Bantuan Kementerian Sosial pada kegiatan Bakti Sosial Kemensos RI yang di laksakan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan penerima bantuan/manfaat sebanyak 2.110 KPM.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan 19.650 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 24.837 KPM , jadi realisasi capaian sebanyak 79,1 %.

*Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 90 % sedangkan realisasi sebanyak 79,1 %. Sehingga Persentase capaian adalah 87,89 %, namun untuk Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) dan PBU Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar sudah UHC yang artinya hamper 100 % penduduk kepulauan Selayar sudah memiliki kartu jaminan kesehatan.*

## **2. Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana”**

Dengan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran diatas yaitu:

### **2.1 Persentase penanganan korban bencana**

Kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan indikator diatas antara lain :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota
  - Penyediaan Makanan, kegiatan ini memberikan bantuan sembako bagi korban bencana dengan target sebanyak 10 KPM dan terealisasi 100 %
  - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, kegiatan ini diperuntukkan untuk para korban yang tidak mempunyai tempat tinggal seperti kapal terdampar, orang hilang dan lain sebagainnya, juga memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asalnya dengan jumlah penerima sebanyak 11 orang
  - Penaganan kelompok rentan dengan jumlah penerima sebanyak 10 orang
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, kegiatan ini memfasilitasi para anggota Tagana dalam melakukan aktivitasnya terutama pada saat tanggap darurat, dan pada saat evakuasi bencana.  
Jumlah anggota tagana yang difasilitasi sebanyak 22 orang dengan pembagian tugas masing-masing kecamatan memiliki 2 orang anggota Tagana.
3. Bantuan APBN Kementerian Sosial.

Bantuan APBN ini di peruntukan untuk para Korban Bencana jumlah Bantuan tersebut berdasarkan hasil assemen dari anggota Tagana, jumlah korban bencana yang di berikan bantuan 84 KK, dan bantuan yang di berikan berupa selimut, Kasur, makanan siap saji, biscuit, alat mandi, Beras, air minum, baju, sarung dll.

*Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah korban bencana yang tertangani selama tahun 2024 untuk APBD sebanyak 31 KK dan APBN sebanyak 115 KK dengan total sebanyak 115 KK dan jumlah korban bencana yang harus ditangani sebanyak 115 KK atau sebanyak 100 %.*

Dari penjelasan di atas dapat dilihat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dalam tabel di bawah berikut:

**Tabel 3.1**  
**Realisas dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					1 2 3 4 5 6
1	Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial	80 %	32,9 %	41,12 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	80 %	78,3 %	97,87 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	79,1 %	87,89 %
2	Meningkanya Penanganan Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	100 %	100 %

### C. REALISASI KEUANGAN

Dari kelompok Belanja Langsung tersebut di atas Dinas Sosial merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.609.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.400.178.007,- atau 95 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.367.700,- atau 98 %

dari alokasi anggaran., dengan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.949.000,- dengan capaian 98,9 %.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.929.500,- dengan capaian 97,6 %.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.928.000,- dengan capaian 97,6 %.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.932.500,- dengan capaian 97,7 %.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD dengan alokasi anggaran 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.901.000,- dengan capaian 96,7 %.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.860.000,- dengan capaian 95,3 %.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.867.500,- dengan capaian 98,6 %.

b) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** Dengan alokasi anggaran Rp. 2.147.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.933.328.590,- Atau 90 % dari alokasi anggaran, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran 2.130.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.967.060.390,- Atau sebesar 92,77 %.
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp.14.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.280.700,- dengan capaian 98,15 %.

- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi anggaran Rp.3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.980.500,- dengan capaian 99 %.
- c) **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.358.200,- atau 99,5 % dari alokasi anggaran, dengan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :
  - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.358.200,- dengan capaian 87 %.
- d) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.8.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.929.000,- atau 98 % dari alokasi anggaran, dengan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 8.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.929.000,- dengan capaian 98 %.
- e) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.662.944.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 658.658.130,- atau 99,86 % dari alokasi anggaran, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.538.000,- Atau 91 % dari alokasi anggaran.
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.948.000,- dengan capaian 98,97 %.
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp.13.775.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.550.000,- dengan capaian 76,59 %.
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp.639.169.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 638.622.130,- dengan capaian 99,91 %.
- f) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.66.534.000,-

dan terealisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 59.530.000,- Atau 89 % dari alokasi anggaran, dengan sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 66.534.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.530.000,-

g) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 418.151.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 380.858.757,- Atau 93,24 % dari alokasi anggaran, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.684.000,- dengan capaian 94 %.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran Rp. 115.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.394.157,- dengan capaian 84,69 %.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran Rp. 298.151.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 278.780.600,- dengan capaian 93,50 %.

h) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 226.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.310.899,- atau 97,6 % dari alokasi anggaran, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran Rp.110.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.151.630,- dengan capaian 98,32 %.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.950.000,- dengan capaian 99 %.
- Pemeliharaan aset tetap lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.978.000,- dengan capaian 99,56 %.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.068.000,- dengan capaian 98,71 %.

## **2. Program Pemberdayaan Sosial**

Program Pemberdayaan Sosial dengan output program dengan alokasi anggaran Rp. 37.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 36.783.800,- atau 99 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran Rp. Rp. 37.000.000,- dan sebesar Rp. 36.783.800,- atau 99 % dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp. Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.783.800,- dengan capaian 99 %.

## **3. Program Rehabilitasi Sosial**

Program Rehabilitasi Sosial dengan dengan alokasi anggaran 2.271.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.242.537.300,- atau 99,63 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial.** dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.591.900,- atau 98,22 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:
- Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.766.300 , dengan capaian 97,66 %.
  - Pemberian layanan rujukan, dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.825.000,- dengan capaian 94,13 %.

- b) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti,** dengan alokasi anggaran Rp.

2.241.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.213.945.400,- atau 99,57 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Permakanan, dengan alokasi anggaran Rp. 1.211.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.184.676.100,- dengan capaian 97,78 %.
- Pemberian layanan rujukan, dengan alokasi anggaran Rp. 1.030.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.029.269.300,- dengan capaian 99,9 %.

#### **4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program perlindungan dan jaminan sosial dengan alokasi anggaran Rp. 836.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 828.166.200,- atau 99,94 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a) **Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**, dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.360.000,- atau 93,60 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Rujukan anak-anak terlantar, dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.360.000,- dengan capaian 93,60%.

b) **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran Rp. 826.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 818.806.000,- atau 99,86 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota, dengan alokasi anggaran Rp. 201.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.266.000,- atau 99,14 %
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.348.000,- atau 99,67 %
- Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp. 425.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 420.192.000,- atau 99,86 %

## **5. Program Penanganan Bencana**

Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp. 240.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 236.560.1400,- atau 96,23 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a) **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota**, dengan alokasi anggaran Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.006.300,- atau 92,14 dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan makanan, dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.213.800,- dengan capaian 97 %
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi, dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.156.000,- dengan capaian 94 %
- Penanganan khusus kelompok rentan, dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.636.500,- dengan capaian 98 %

b) **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran Rp. 170.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.553.800,- atau 99,9 % dari alokasi anggaran dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan alokasi anggaran 170.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.553.800,- atau 99,9 %

## **6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.887.450,- atau 93 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran 30.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 27.887.450,- atau 93 % adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.887.450,- atau 93 %

Dari penjelasan realisasi keuangan diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat evesiens dan evektifitas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efesien terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

#### **D. TARGET DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024.**

Target dan realisasi Indikator kinerja kunci (IKK) pada Dinas Sosial Kabupaten kepulauan Selayar tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Kab. Kep Selayar Tahun 2023 - 2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2023		2024		KET
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Aspek Pelayanan Umum (Bidang Sosial)							
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang diberdayakan	%	37,59	12,58	42,4	22,5	
2	Persentase warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	
3	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti	%	100	100	100	100	
4	Persentase warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	
5	Persentase warga Negara gelandangan dan pengemis yang	%	100	100	100	100	

	memperoleh rehabilitasi dasar tuna sosial diluar panti						
6	Percentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	21,32	40,54	24,54	53,6	
7	Percentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	%	38,12	40,74	42,15	73,28	
8	Percentasi warga Negara korban bencana kebupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	
9	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

Dari table diatas dapat diketahui bahwa :

1. Percentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang diberdayakan dengan target 42,4 % sedangkan realisasi hanya 22,5 % karena jumlah TKSK , Peksos, pendamping PKH dan Anggota Karang Taruna yang diberi pemberdayaan berupa Bimtek, Pelatihan dan sosialisasi sebanyak 45 Orang dari total PSKS sebanyak 200 orang.
2. Percentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (target SPM) dengan target penanganan sebanyak 269 orang dan realisasi sebanyak 269 Orang sehingga capaiannya sebesar 100 %
3. Percentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti (Target SPM) dengan target penanganan sebanyak 60 orang dan realisasi sebanyak 60 Orang sehingga capaiannya sebesar 100 %
4. Percentase warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (Target SPM) dengan target penanganan sebanyak 3.786 orang dan realisasi sebanyak 3.786 Orang sehingga capaiannya sebesar 100 % termasuk dengan PKH
5. Percentase warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi dasar tuna sosial diluar panti (Target SPM) dengan target penanganan sebanyak 1 orang dan realisasi sebanyak 1 Orang sehingga capaiannya sebesar 100 %
6. Percentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dengan target 24,54 % sedangkan realisasi sebesar 53,6 %, dari 26 jenis PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan, capaian melebihi 100 % karena

banyaknya bantuan dari pemerintah pusat termasuk pada saat Bakti Sosial yang di Pusatkan di Kab. Kepulauan Selayar.

7. Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi dengan target 42,15 %, PPKS yang berhasil d fasilitasi sebanyak 18.202 KPM dari data PPKS sebanyak 24.837 KPM sehingga realisasinya sebesar 73,28 %, dengan rincian sebagai berikut : PKH 7.545 KPM, BPNT 9.995 KPM, Bantuan Pemberdayaan dan rujukan anak-anak terlantar dengan total PPKS yang berhasil difasilitasi sebesar 18.202 KPM/24.837 KPM.
8. Persentasi warga Negara korban bencana kebupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan target penanganan sebanyak sebesar 100 % dan realisasi juga 100 % karena semua laporan bencana yang masuk telah di tindaklanjuti dengan berbagai pelayanan diantaranya pemberian bantuan baik itu bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan APBN.
9. Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola sebanyak 1 Unit yang terletak di Desa Barugaiaya Kec. Bontomanai Kabupaten kepulauan Selayar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 ini merupakan tanggungjawab tertulis atas penyelengaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Laporan ini menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026.

Secara umum sasaran Stratejik yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Tahun 2024, telah mencapai hasil sesuai target yang diharapkan, tentunya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan dan untuk pencapaian tujuan tersebut kedepan antara lain :

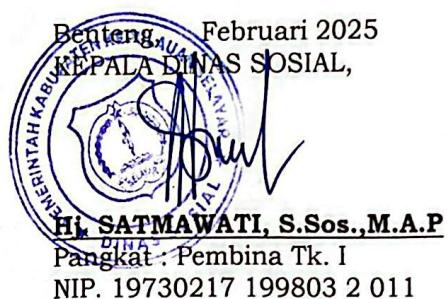
1. Masih terbatasnya jumlah PNS yang telah mengikuti penjenjangan dan pelatihan teknis.
2. Masih terbatasnya Kuantitas pegawai, sehingga pelaksanaan tugas – tugas kedinasan terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai, masih perlu penambahan Komputer, Laptop, printer dan penambahan ruangan Kantor serta pengadaan Operasional roda 4 dan roda 2 untuk penanggulangan bencana.
4. Belum adanya Rumah singgah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap PPKS.
5. Masih terbatasnya alokasi dana baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

Adapun upaya – upaya/usaha – usaha yang ditempuh oleh Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a. Diusulkan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana untuk anggaran Tahun 2024 yang akan datang.

- c. Mengusulkan pembangunan Rumah Singgah untuk tahun anggaran 2025.
- d. Mengharapkan kucuran bantuan dana pembagunan yang lebih banyak dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 mendatang dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan lagi.



Instansi : DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	TUJUAN RESTRA	INDIKATOR KINERJA		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Tahun Ini (2024)			Keterangan		
		TUJUAN	SASARAN RESTRA			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dinas sosial	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial	Nilai Sakip Dinas Sosial	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Input : Dana	Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Target : Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi : Dokumen %	Rp 5.000.000	4.949.000	98.98
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Input : Dana	Output : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Target : Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Realisasi : Dokumen %	Rp 3.000.000	2.979.500	97.65
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Input : Dana	Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Target : Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Realisasi : Dokumen %	Rp 3.000.000	2.928.200	97.61
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Input : Dana	Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Target : Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Realisasi : Dokumen %	Rp 3.000.000	2.932.500	97.75
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Input : Dana	Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Target : Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Realisasi : Dokumen %	Rp 3.000.000	2.901.000	96.70

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Input : Dana Output : Jumlah laporan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tersedianya laporan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Rp. Laporan 3.000.000 1 1 2.860.000 1 100 93,33
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Input : Dana Output : jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Laporan 10.000.000 5 5 100 100 100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Input : Dana Output : Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. Laporan 14.550.000 1 1 100 100 98,15
	Keuangan Dinas Sosial Sesuai SAP	Pengeleboran dan penyajikan bahan tanggapan pemeriksaan Input : Dana Output : jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan Outcome : Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Rp. Dokumen 3.000.000 1 1 100 100 99
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Input : Dana Output : Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN Outcome : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Rp. Orang 2.130.050.000 22 22 100 100 92,77
	Administrasi Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Input : Dana Output : Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Outcome : Tersedianya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rp. Laporan 5.000.000 1 1 100 100 87

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Input : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Output : Tersediannya jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dana Rp. 8,100,000	7,929,000	98
		Administrasi Kepengawahan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan Rp. 639,169,000	638,622,130	99,91
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome : Tersediannya Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan Rp. 1	1	100
		Penyediaan bahan logistik Kantor	Input : Dana Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome : Tersediannya bahan logistik kantor	Paket Rp. 5,000,000	4,538,000	91
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana Output : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome : Tersediannya paket barang cetakan dan penggandaan	Paket Rp. 5,000,000	4,948,000	96,96
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan Outcome : Tersediannya Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan	Dokumen Rp. 13,775,000	10,550,000	76,59
		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Input : Dana Output : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Outcome : Tersediannya Peralatan dan Mesin lainnya	Unit Rp. 66,534,000	59,530,000	89
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	Laporan Rp. 5,000,000	4,684,000	94

	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Input : Dана Output : Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	Rp. 15,000,000 14,636,500	Orang 10 10 100
		Outcome : Terpenuhinya orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	% 100 100 100	
	Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Input : Dana Output : Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga bencana terpenuhinya orang yang melaksanakan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna	Rp. 170,000,000 169,553,800 100 22 22 100 100 100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Input : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Output : Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	Rp. 30,000,000 27,887,450 93 28 28 100 100 100
	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	% 100 100 100



Berencana & Laksanakan  
Kepala Dinas Sosial

**DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB				
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepergawainan	1	1	1				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD 6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 9 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapatan pemeriksaan 10 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD 12 Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi Kepergawainan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubag, Program Dan Keuangan Kasubag, Program Dan Keuangan

Penyeleenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD			Kewenangan		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	3	3	3	14	Penyediaan bahan logistik kantor	✓	✓
Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	3	3	15	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	✓	✓
Jumlah Paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1	16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	✓	✓
Jumlah Paket Mebel yang disediakan			4	17	Pengadaan Mebel		✓	1 Paket
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			7	18	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	✓	7 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓	✓	Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	3	3	20	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	✓	✓	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	21	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	✓	✓	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1			22	Pemeliharaan/ Renabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	✓	✓	Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22		17	23	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Kendaraan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	✓	42 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4	3		24	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	✓	7 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag Umum
Jumlah asset tetap lainnya yang dipelihara	4	4		25	Pemeliharaan aset tetap lainnya	✓	8 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)				26	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	✓	11 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	11	11	11	27	Pemberian layanan kedaruratan	✓	30 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan Layanan			30	28	Pemberian Layanan rujukan	✓	10 Orang	
Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota			10					

*(kecuali anggaran kelembagaan kabupaten/kota)*

Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS	10	30	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu identitas Anak.	✓	✓	✓	✓	✓	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	17	31	Pemberian Layanan Rujukan	✓	✓	✓	✓	✓	17 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	5	32	Rujukan anak-anak terlantar	✓	✓	✓	✓	✓	5 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah keluarga yang mendapatkan pengertasan fakir miskin kabupaten/kota	24.837	24.837	33 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	24837	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah keluarga pemenerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan kabupaten/kota kesejahteraan kabupaten/kota	7545	7545	34 fasilitasi bantuan sosial kesejahteraaan keluarga	✓	✓	✓	✓	✓	7545	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	35 fasilitasi bantuan pengembangan Ekonomi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	200 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan perpanjangan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	10	36	Penyediaan Makanan	✓	✓	✓	✓	✓	10 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	1	37 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	✓	✓	✓	✓	✓	1 Unit	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10	38	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	✓	✓	✓	✓	✓	10 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	22	22	39 Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	22 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

	Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	28	28	28	28	Nasional Kabupaten/Kota
--	--	----	----	----	----	-------------------------



**RENCANA KERJA DAN PENDANNAAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU 2026**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

				Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju tahun 2026				
Bid. Urusan	Prog. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Cacatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									11,473,183,849		
06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,103,183,849	
06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									150,000,000	
06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	40,000,000		3 Dokumen			20,000,000	
06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen			10,000,000	
06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen			10,000,000	
06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen			10,000,000	
06 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen			10,000,000	
06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen			10,000,000	
06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	5 Dokumen	60,000,000		1 Dokumen			80,000,000	
06 01 02.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan Baik						2,270,212,000			2,377,122,919	
06 01 02.2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Sosial	ASN	Kab. Kep. Selayar	24 Orang	2,229,412,000		24 Orang			2,327,122,919	
06 01 02.2 05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	37,800,300		1 Dokumen			10,000,000	

02.3	04	akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
06	01	02.2 07 keuangan bulanan/titwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Dokumen	0	10,000,000
06	01	02.2 06 Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemerkasaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen
06	01	02.2 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran		ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000
06	01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah dengan baik				5,000,000	20,000,000
06	01	2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen
06	01	2.03 06 Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10,000,000	
06	01	2.05 Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian				13,000,000	90,000,000
06	01	2.05 01 Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disiapkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	0	2 Unit
06	01	2.05 02 Pengadaan peralatan dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang memperoleh pakalan dinas dan kelengkapan lainnya	ASN	Kab. Kep. Selayar	25 ASN	0	25 ASN
06	01	2.05 04 Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000	10,000,000
06	01	2.05 09 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	ASN	Kab. Kep. Selayar	5 ASN	10,000,000	7 ASN
06	01	2.06 Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum dengan baik				431,812,000	360,000,000
06	01	2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	ASN	Kab. Kep. Selayar	136 Laporan	411,699,000	136 Laporan
06	01	2.06 04 Penyediaan bahan logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	5,256,500	12 Bulan
06	01	2.06 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	ASN	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan
06	01	2.06 06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jasa perizinan kendaraan Dinas/Operasional	ASN	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	9,856,500	1 Tahun
06	01	2.07 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					89,500,000	250,000,000

06	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Periengkapan Kantor yang diadakan	ASN	Kab. Kep. Selayar	14,500,000	11 Unit	25,000,000
06	01	2.07	05	Pengadaan Saran dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana rumah singgah	ASN	Kab. Kep. Selayar	0	3 Set	25,000,000
06	01	2.07	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	ASN	Kab. Kep. Selayar	424,769,000		586,060,930
06	01	2.08	01	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya, air dan listrik	Tersedianya Pevedianya jasa komunikasi,sumber daya, air dan listrik	ASN	Kab. Kep. Selayar	5,000,000	267 Buah	8,000,000
06	01	2.08	02	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	ASN	Kab. Kep. Selayar	114,999,000	12 Bulan	100,000,000
06	01	2.08	04	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	ASN	Kab. Kep. Selayar	304,770,000	12 Bulan	478,060,930
06	01	2.09		Pemeliharaan/R/Rehabilitasi gedng kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (LK3).	ASN	Kab. Kep. Selayar	239,350,000		270,000,000
06	01	2.09	09	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,apalida dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Operasional)	ASN	Kab. Kep. Selayar	99,940,000	2 Unit	100,000,000
06	01	2.09	02	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	ASN	Kab. Kep. Selayar	129,580,000	37 Unit	150,000,000
06	01	2.09	06	Pemeliharaan asset tetap lainnya	Jumlah asset tetap lainnya yang dipelihara	ASN	Kab. Kep. Selayar	4,950,000	57 Unit	10,000,000
06	01	2.09	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		ASN	Kab. Kep. Selayar	4,880,000	57 Unit	10,000,000
06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Teraksanaanya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			50,000,000		325,000,000
06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Masyarakat KAT yang difasilitasi	Masyarakat KAT	Kab. Kep. Selayar	0		100,000,000
06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Pembakaran	Masyarakat KAT	Kab. Kep. Selayar	30 KK	1 Paket	100,000,000
06	02	2.01	02		Tersedianya Dokumen Study Kelayakan Lokasi KAT			0	1 Paket	0



Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas Tertanar, Anak Tertanar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertanar, Anak Tertanar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Pendamping PKH yang Memberikan Bimbingan/Pendampingan		Pendamping PKH		Kab. Kep. Selayar		... KPM		0		300 orang		150.000.000					
06	04	2.01	06	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kantu Identitas Anak	Jumlah Operasional Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu Identitas Anak	PMKS	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	10.000.000				
06	04	2.01	07	Pemberian Layanan Kedauratan	PMKS	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	30 Orang	50.000.000			
06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Tertangani	PMKS	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	10 Orang	70.000.000		
06	04	2.01	12	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Pantai Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Pantai Sosial	PMKS	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	1.201.600.000	3.280.000.000	
06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Penyediaan Permakahan	Jumlah Penerima BPNT/Sembako yang di pantau dan diawasi penyalurnya Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan permakanan	Penerima BPNT/Sembako	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	0	12597 KPM	100.000.000	
06	04	2.02	03	Penyediaan Alat Bantu	Masyarakat Miskin	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Dana Insentif Fiskal	600.000.000		
06	04	2.02	05	Pemberian Pelajaran dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	PMKS (POKIR)	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Pokir	300 KK	400.000.000	
06	04	2.02	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Keluarga Jadi waris pahlawan Yang mendapatkan penghargaan	Ketua Organisasi waris pahlawan	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	27 KK	70.000.000	
06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Kedauratan	Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan Perbaikan Rumah	Penerima bantuan RTLH	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Dana Insentif Fiskal	300 KK	2.000.000.000
06	04	2.02	02	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penurjung operasional Pemberian Layanan Kedauratan	PMKS	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	10.000.000	
06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penurjung operasional Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	PMKS	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	30.000.000	

06	04	2.02	09	nikah, dan kartu identitas anak	pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Kab. Kep. Selayar	10 Orang	1,000,000	1 Tahun	20,000,000
06	04	2.02	10	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Terwujudnya pelayanan pada SLRT	Kab. Kep. Selayar	... KPM	0	100 KK	50,000,000
06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL</b>		Kab. Kep. Selayar		806,319,000		305,000,000
06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pmeliharaan Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar		10,000,000		130,000,000
06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang Berhasil Di Langkau	Kab. Kep. Selayar			50 Orang	30,000,000
06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan	Kab. Kep. Selayar	5 Orang	10,000,000	30 Orang	80,000,000
06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Penunjang Operasional Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Anak Terlantar	Kab. Kep. Selayar			1 Tahun	20,000,000
06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar		796,319,000		175,000,000
06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Dengan Aplikasi Siks-Ng Dan SIRT Serta web Dinas Sosial	Kab. Kep. Selayar	2 Aplikasi dan 1Web	71,319,000		2 Aplikasi dan 1Web
06	05	2.02	03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial kewenangan kab/kota	Kab. Kep. Selayar	7545 KPM	20,000,000		
06	05	2.02	04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kab/kota	Kab. Kep. Selayar	200 KK	705,000,000		
06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		Kab. Kep. Selayar		160,000,000		420,000,000
06	06	2.01		Perilindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perilindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar		60,000,000		270,000,000
06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Korban Bencana	10 Orang	25,000,000	200 KK Korban Bencana	100,000,000

			Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Sandang	Korban Bencana	Kab. Kep. Selayar	100 KK	70,000,000	
	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana/Orang Terlantar Yang Ditampung	Korban Bencana	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	20,000,000	
	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Keluarga Rentan Yang Mendapatkan Bantuan Rantau	Korban Bencana	Kab. Kep. Selayar	10 Orang	15,000,000	
	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rantau	Terlaksananya Pelayanan pemerdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota				35 Orang	
06	06	2.02	Pelayanan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Yang mendapatkan tali asih Panunjang operasional Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Bencana	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	22 Orang	100,000,000	
06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kab. Kep. Selayar	100%	
06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kab. Kep. Selayar	6 Kec	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMA MAKAN PAHLAWAN</b>					250,000,000		120,000,000	
06	07	2.01	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Terlaksananya Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota			250,000,000	
06	07	2.01	01	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman pahlawan nasional kabupaten/kota	Rehab Pagar TM/P	Taman makam pahlawan	Kab. Kep. Selayar	120,000,000
06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP dan Pelaksanaan Taman Pahlawan	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	100,000,000
06	07	2.01	02	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				20,000,000

